Cara Mengutip (Gaya APA):

Eka Dayani Yulianti, eni Zein Tarsidi, & Sukarno. (2026). Stui Fenomenologi Penguatan igital Citizenship Berbasis Literasi Digital dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila di Sekolah Dasar. *Didaktika Dwija Indria, 14 (5), 2801-2813*.
https://doi.org/10.20961/ddi.v14i5.14.5.2801-2813

Didaktika Dwija Indria
Jurnal Ilmiah Pendidikan
ISSN 2337-8786 (Print) | ISSN 2775-2917 (Online)

Studi Fenomenologi Penguatan *Digital Citizenship* Berbasis Literasi Digital dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila di Sekolah Dasar

Eka Dayani Yulianti [1], Deni Zein Tarsidi [2], Sukarno[3]
[1] Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
[2] Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
[3] Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Email penulis korespondensi: **denizein@staff.uns.ac.id**

Dikirim : 1 Agustus **DOI:** https://doi.org/10.20961/ddi.v14i5
Direvisi : 1 September
Diterima : 1 Oktober

Kata Kunci:
Digital citizenship; digital literacy; Pancasila Education; elementary school; phenomenology

Abstrak

This study is motivated by the high internet penetration in Indonesia, reaching approximately 80.66% of the population in 2025, while cases of cyberbullying among children continue to rise to an average of 40 cases per month, making the strengthening of digital citizenship from elementary school age an urgent matter. This study aims to analyze digital information access, digital communication, and digital ethics in Pancasila Education learning as a means of strengthening digital citizenship in elementary schools. The study employed a qualitative phenomenological approach with nine teachers and eighteen students from three elementary schools, namely SD Aisyiyah Unggulan Gemolong, SD Kristen Manahan, and SD Negeri Mojo Surakarta, as participants. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and documentation studies, then analyzed using Colaizzi's seven-step method and validated through source and technique triangulation. The results show that digital information access occurred through a teacher-mediated access pattern with varying levels of critical literacy quality across schools, digital communication was formed through a triangular school–parent–student ecosystem via WhatsApp groups, and digital

© Penulis(i). 2026

Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons - Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

Attribution-NonCommercial-ShareAlike. Beberapa hak dilindungi

ethics was organically integrated with Pancasila values without formal coordination among schools. This study implies that integrating digital citizenship does not require a new subject, but can instead be carried out contextually by linking digital ethics to existing Pancasila values in learning, so that students become not only technically competent but also of good character.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Kemajuan teknologi digital yang berlangsung cepat telah mengubah cara manusia hidup, berinteraksi, dan memperoleh informasi seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di Indonesia, perkembangan teknologi digital turut mengubah pola komunikasi, bentuk interaksi sosial, serta relasi antarwarga negara dalam kehidupan kontemporer, khususnya dalam hal akses informasi dan partisipasi digital masyarakat. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, jumlah pengguna internet di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 229,4 juta orang atau setara 80,66 persen dari total populasi pada tahun 2025 (APJII, 2025). Data global yang dihimpun (Social & Meltwater, 2025) juga menunjukkan bahwa pengguna internet dunia telah mencapai sekitar 5,65 miliar orang atau 68,7 persen dari populasi global, sementara pengguna internet di Indonesia telah melampaui 200 juta orang dengan tingkat penetrasi lebih dari 70 persen.

Tingginya angka penetrasi digital tersebut tidak selalu diiringi oleh kesiapan etika dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi. Generasi muda yang cakap secara teknis dalam mengoperasikan perangkat digital belum tentu memiliki kesadaran yang memadai terkait etika digital, keamanan daring, dan tanggung jawab sosial di ruang digital (Widyawati & Karina, 2025). Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat peningkatan signifikan kasus perundungan siber yang melibatkan anak-anak, dengan rata-rata 40 kasus per bulan di Indonesia, sebuah kondisi yang menandakan bahwa kemampuan mengevaluasi dan menggunakan informasi secara bijak masih menjadi tantangan serius bagi dunia pendidikan (Magfira et al., 2024).

Literasi digital didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk memperoleh, memahami, menilai, dan menghasilkan konten digital secara kritis dan bertanggung jawab (Pratiwi et al., 2024). Literasi digital tidak hanya mencakup keterampilan teknis dalam mengoperasikan perangkat, tetapi juga aspek kognitif berupa kemampuan berpikir kritis dan aspek sosial-emosional berupa etika serta tanggung jawab dalam berinteraksi di ranah digital (Isabella et al., 2023). Peran strategis literasi digital ini tidak terbatas pada satu bidang saja, sebab kemampuan mengakses, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi digital juga turut mendukung penguatan literasi numerasi dan literasi sains peserta didik (Surya et al., 2025). Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran yang berfokus pada pembangunan karakter dan nilai-nilai kewarganegaraan memiliki peran signifikan dalam membentuk *digital citizenship* peserta didik, karena melalui pembelajaran ini peserta didik tidak hanya mempelajari nilai-nilai Pancasila secara teoretis, tetapi juga cara menerapkannya dalam kehidupan digital sehari-hari (Megasari, 2023).

Attribution-NonCommercial-ShareAlike. Beberapa hak dilindungi

Ribble (2015) mendefinisikan *digital citizenship* sebagai aturan perilaku yang benar dan bertanggung jawab dalam mengakses teknologi, yang mencakup kemampuan berpartisipasi dalam masyarakat secara daring dengan aman, etis, dan bertanggung jawab. Konsep ini terbentuk dari tiga elemen utama yang saling bergantung, yaitu hak, tanggung jawab, dan keamanan (Ribble & Bailey, 2011). Dalam konteks pendidikan dasar, peserta didik kelas tinggi berada pada tahap operasional konkret menuju formal menurut Piaget, sehingga periode ini menjadi kritis untuk internalisasi nilai dan etika digital (Ma'rifatun Nisaa et al., 2025).

Masalah Penelitian

Ketidakseimbangan antara peningkatan akses internet dan penguasaan literasi digital dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan bagi perkembangan karakter peserta didik sebagai pengguna aktif media digital. Pendidikan Pancasila di sekolah dasar memiliki peran strategis sebagai wahana penguatan nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab kewarganegaraan di ruang digital, namun belum diketahui secara mendalam bagaimana ketiga aspek literasi digital, yaitu akses informasi, komunikasi, dan etika digital, benar-benar terimplementasi dalam praktik pembelajaran Pendidikan Pancasila di lapangan, khususnya pada sekolah dasar dengan kondisi infrastruktur digital yang berbeda-beda (Rosyidah et al., 2025).

Keadaan Terkini Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan pentingnya integrasi *digital citizenship* dan literasi digital dalam konteks pendidikan. Abiyuna et al., (2024) mengungkapkan bahwa pembelajaran berbasis etika digital dapat mewujudkan digital citizenship yang baik melalui Pendidikan Pancasila dengan strategi yang meliputi pendidikan etika digital, pemanfaatan sumber belajar daring, dan diskusi kelas berbasis nilai-nilai Pancasila. Azis et al., (2021) mengeksplorasi konsep *digital citizenship* dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada era pandemi Covid-19 dan menemukan bahwa pengembangan karakter peserta didik dapat dilakukan secara efektif melalui pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Izzah et al., (2025) mengidentifikasi bahwa peserta didik sekolah dasar kelas tinggi memerlukan strategi literasi digital dan keamanan daring yang terstruktur, sementara Kusdiani & Tirtoni (2025) menunjukkan bahwa implementasi Pendidikan Pancasila berkebhinekaan global efektif dalam menumbuhkan karakter peserta didik melalui pengajaran nilai-nilai Pancasila dan kegiatan yang mengembangkan literasi multikultural. Sejalan dengan itu, Tarsidi et al., (2023) menemukan bahwa penguatan literasi digital berperan penting dalam membentuk keterlibatan warga negara yang lebih aktif dan bertanggung jawab di kalangan generasi digital. Sementara itu, Fatmasari et al., (2025) menekankan bahwa penerapan pembelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah dasar perlu memperhatikan keberagaman gaya belajar peserta didik melalui pendekatan berdiferensiasi, sehingga strategi pembelajaran yang digunakan, termasuk yang berbasis teknologi digital, dapat menjangkau kebutuhan peserta didik secara lebih merata.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah mengkaji aspek *digital citizenship*, literasi digital, dan Pendidikan Pancasila secara terpisah, belum ada penelitian yang mengintegrasikan ketiga aspek tersebut secara komprehensif, khususnya dalam konteks pembelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah dasar Indonesia. Meilida et al., (2025) mengungkapkan bahwa kurangnya literasi digital dapat berkontribusi pada perilaku tidak etis di kalangan peserta didik sekolah dasar, sementara Ulum & Asrori (2025) melaporkan bahwa meningkatnya kasus perundungan siber yang melibatkan peserta didik sekolah dasar menunjukkan perlunya pendidikan *digital citizenship* yang sistematis sebagai intervensi preventif.

Kebaruan, Kesenjangan Penelitian & Tujuan

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hubungan spesifik antara komponen literasi digital dan elemen *digital citizenship* pada konteks peserta didik sekolah dasar yang mengeksplorasi kontribusi keterampilan teknis, kognitif, dan sosial-emosional terhadap pembentukan sikap *digital citizenship* yang positif, serta pemetaan komprehensif faktor eksternal dan internal yang memengaruhi efektivitas implementasinya di tiga sekolah dengan karakteristik infrastruktur digital yang berbeda. Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengalaman akses informasi digital dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila untuk penguatan *digital citizenship* di sekolah dasar; (2) menganalisis pengalaman komunikasi digital dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila untuk penguatan *digital citizenship* di sekolah dasar; dan (3) menganalisis pengalaman etika digital dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila untuk penguatan *digital citizenship* di sekolah dasar.

METODE

Jenis dan Desain

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Fenomenologi berkaitan dengan bagaimana suatu objek, kejadian, atau kondisi muncul dalam pandangan manusia, di mana pengetahuan diperoleh melalui pengalaman yang disadari (Colaizzi, 1978). Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk memahami pengalaman peserta didik dan guru dalam mengimplementasikan literasi digital untuk penguatan *digital citizenship*, yang merupakan fenomena yang relatif baru dalam konteks pendidikan dasar di Indonesia. Fenomena yang dieksplorasi adalah pengalaman guru Pendidikan Pancasila dalam mengintegrasikan literasi digital dalam pembelajaran untuk penguatan *digital citizenship*, serta pengalaman peserta didik dalam memahami dan mempraktikkan konsep tersebut.

Data and Sumber Data

Data dalam penelitian ini berupa data kualitatif yang mencakup hasil wawancara dengan guru kelas mengenai implementasi literasi digital, pemahaman tentang *digital citizenship*, strategi pembelajaran, serta tantangan yang dihadapi, dan hasil wawancara dengan peserta didik mengenai pengalaman dan pemahaman

mereka. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan guru kelas dan peserta didik di tiga sekolah dasar (Sugiyono, 2024). Sumber data sekunder berupa observasi langsung terhadap situasi pembelajaran serta studi dokumentasi terhadap modul pembelajaran, kurikulum, dan dokumen resmi sekolah yang relevan (Adlini et al., 2022).

Partisipan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pemilihan sampel dengan kriteria tertentu yang dianggap penting oleh peneliti (Sugiyono, 2024). Kriteria pemilihan meliputi guru kelas yang mengajar Pendidikan Pancasila dengan pengalaman mengajar minimal dua tahun dan aktif mengintegrasikan teknologi digital dalam pembelajaran, serta peserta didik yang aktif mengikuti pembelajaran dan bersedia menjadi partisipan. Jumlah partisipan ditentukan berdasarkan prinsip kejenuhan data, yaitu ketika informasi yang diperoleh tidak lagi memberikan wawasan baru yang signifikan (Creswell & Poth, 2024). Penelitian ini melibatkan sembilan guru kelas dan delapan belas peserta didik dari tiga sekolah dasar, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Partisipan Penelitian

Sekolah	Jenis Kelembagaan	Kode Guru	Kode Peserta Didik	Total Partisipan
SD Aisyiyah Unggulan Gemolong	Swasta Islam Unggulan	GR-01, GR-02, GR-03	PD-01 s.d. PD-06	9 orang
SD Kristen Manahan	Swasta Kristen	GR-04, GR-05, GR-06	PD-07 s.d. PD-12	9 orang
SD Negeri Mojo Surakarta	Sekolah Negeri	GR-07, GR-08, GR-09	PD-13 s.d. PD-18	9 orang
Total	3 Sekolah	9 Guru	18 Peserta Didik	27 orang

Sumber: Data peneliti (2026). Keterangan: GR = Guru; PD = Peserta Didik

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, observasi dilaksanakan di kelas selama proses pembelajaran Pendidikan Pancasila untuk mengamati penerapan literasi digital dan *digital citizenship* oleh guru dan peserta didik (Ardiansyah et al., 2023). Kedua, wawancara semi-terstruktur dilakukan terhadap guru kelas dan peserta didik untuk menggali pemahaman, pengalaman, dan strategi pembelajaran yang digunakan (Sugiyono, 2024). Ketiga, studi dokumentasi dilakukan terhadap kurikulum, modul pembelajaran, dan dokumen kebijakan sekolah terkait integrasi teknologi digital, yang memberikan data historis dan kontekstual untuk memperkuat temuan dari wawancara dan observasi (Adlini et al., 2022).

Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan tujuh langkah Colaizzi (1978), yaitu: (1) membaca dan memahami deskripsi pengalaman partisipan secara berulang untuk memperoleh pemahaman menyeluruh; (2) mengekstrak pernyataan penting yang signifikan berkaitan dengan fenomena penelitian; (3) merumuskan makna dari setiap pernyataan penting menggunakan bahasa yang lebih konseptual; (4) mengelompokkan makna ke dalam gugus tema secara induktif; (5) menyusun deskripsi lengkap yang mencakup seluruh aspek fenomena; (6) mengidentifikasi struktur fundamental sebagai esensi inti dari keseluruhan pengalaman; dan (7) melakukan validasi melalui triangulasi.

HASIL

Temuan penelitian disajikan berdasarkan tiga dimensi: akses informasi digital, komunikasi digital, dan etika digital dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila di tiga sekolah dasar.

Akses Informasi Digital dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila

Observasi langsung pada sembilan kelas di tiga sekolah menemukan pola yang seragam: tidak ada satu pun peserta didik yang mengoperasikan perangkat digital secara mandiri selama pembelajaran. Seluruh akses digital dikelola oleh guru sebagai operator tunggal *(teacher-mediated access),* sementara peserta didik menyimak tayangan secara kolektif. Pola ini berlangsung konsisten tanpa pengecualian di ketiga sekolah.

Kualitas pengalaman belajar digital berbeda signifikan bergantung pada infrastruktur. Di SD Aisyiyah Unggulan Gemolong, koneksi internet stabil memungkinkan guru menampilkan dua artikel berbeda secara bersamaan untuk dibandingkan kebenarannya, satu-satunya praktik literasi kritis informasi yang teramati dalam seluruh sesi observasi. Di SD Negeri Mojo, guru mengunduh materi terlebih dahulu dan mengembangkan strategi kata kunci spesifik untuk tugas pencarian informasi di rumah. Dari sisi peserta didik, kemampuan evaluasi informasi bervariasi: peserta didik SD Aisyiyah Unggulan Gemolong mampu membedakan sumber berdasarkan domain, peserta didik SD Kristen Manahan mengecek minimal dua sumber, sedangkan peserta didik SD Negeri Mojo masih mengandalkan kesesuaian dengan buku teks. Variasi kemampuan evaluasi informasi antar peserta didik ini sejalan dengan temuan bahwa tingkat kompetensi literasi digital peserta didik sekolah dasar juga dipengaruhi oleh gaya belajar masing-masing, sehingga wajar apabila kualitasnya berbeda meski berada dalam kondisi pembelajaran yang serupa (Wijaya et al., 2024). Ketiga sekolah konsisten memastikan kesetaraan akses melalui tayangan kolektif dan sistem berpasangan bergantian di laboratorium komputer.

Komunikasi Digital dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila

Tidak terjadi satu pun interaksi komunikasi digital antara guru dan peserta didik di dalam kelas selama sembilan sesi observasi. Seluruh komunikasi berlangsung tatap muka. Kondisi ini menciptakan ekosistem komunikasi digital yang unik di luar jam sekolah melalui grup percakapan orang tua sebagai satu-

satunya kanal komunikasi digital aktif di ketiga sekolah. Grup ini beroperasi sebagai instrumen pedagogis dua arah: salah satu guru SD Aisyiyah Unggulan Gemolong memanfaatkannya untuk mengetahui aktivitas digital peserta didik di rumah dan menyesuaikan materi di kelas, sementara guru SD Kristen Manahan mengembangkan formulir berkala untuk memantau kebiasaan digital anak.

Meskipun tanpa praktik langsung di kelas, norma komunikasi digital diajarkan secara intensif melalui simulasi, diskusi kasus, dan analogi. Seluruh delapan belas peserta didik dari ketiga sekolah mampu mendeskripsikan prosedur komunikasi digital yang santun dan secara spontan menyebutkan larangan membagikan data pribadi kepada orang tidak dikenal. Konsistensi ini mengindikasikan internalisasi yang telah melampaui hafalan aturan dan memasuki tahap pemahaman nilai.

Etika Digital dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila

Temuan paling khas dari dimensi ini adalah tidak satu pun guru mengajarkan etika digital sebagai topik yang berdiri sendiri. Etika digital hadir secara organik dalam pembahasan nilai-nilai Pancasila tanpa koordinasi formal antar sekolah. Di SD Negeri Mojo, pengendalian diri dalam menggunakan media digital dikaitkan langsung dengan nilai disiplin Pancasila. Di SD Kristen Manahan, pencegahan hoaks dikaitkan dengan sila ketiga tentang persatuan, dan guru mengajarkan prinsip *pause before you post*. Di SD Aisyiyah Unggulan Gemolong, hak cipta dibahas secara visual dan interaktif melalui tayangan perbandingan antara mengutip dengan mencantumkan sumber dan menjiplak tanpa izin.

Variasi paling mencolok ditemukan pada dimensi kesehatan digital. SD Aisyiyah Unggulan Gemolong menerapkan aturan dua puluh menit-dua puluh kaki-dua puluh detik secara *eksplisit* dan mengomunikasikannya kepada orang tua. SD Kristen Manahan memadukan pembatasan waktu layar dengan tantangan satu hari bebas layar bersama keluarga. SD Negeri Mojo lebih bersifat reaktif tanpa program terstruktur. Di SD Aisyiyah Unggulan Gemolong juga ditemukan *peer monitoring*, di mana peserta didik saling mengingatkan etika bahasa digital satu sama lain.

PEMBAHASAN

Akses Informasi Digital sebagai Fondasi *Digital Citizenship*

Temuan penelitian menunjukkan bahwa ketiga sekolah menerapkan strategi pengelolaan akses informasi digital yang berbeda secara kontekstual, namun konvergen dalam satu tujuan, yaitu memastikan peserta didik dapat mengakses informasi secara merata, terarah, dan bertanggung jawab. Pola yang paling konsisten dan teramati di semua sembilan sesi observasi adalah *teacher-mediated access*, di mana seluruh akses digital dikelola oleh guru sebagai operator tunggal sementara peserta didik berposisi sebagai penerima informasi yang menyimak tayangan bersama. Ribble & Bailey (2011) mendefinisikan *digital access* sebagai partisipasi elektronik secara penuh dalam masyarakat yang menekankan hak dan kesempatan setiap individu untuk mengakses teknologi digital secara setara, dan Ribble (2015) mempertegas bahwa *digital access* tidak hanya berkaitan dengan

ketersediaan perangkat fisik, tetapi juga mencakup kemampuan memanfaatkan teknologi secara optimal.

Sistem berpasangan bergantian di laboratorium komputer yang diterapkan di ketiga sekolah tanpa koordinasi formal mencerminkan perwujudan nilai keadilan sila kelima Pancasila dalam dimensi digital. Guru-guru secara organik memastikan tidak ada peserta didik yang tertinggal hanya karena keterbatasan perangkat, sejalan dengan prinsip keadilan akses yang ditekankan oleh (Ribble, 2015). Perbedaan yang paling signifikan antar sekolah ditemukan pada aspek verifikasi sumber informasi, di mana SD Aisyiyah Unggulan Gemolong dan SD Kristen Manahan secara aktif memodelkan praktik verifikasi sumber, sedangkan SD Negeri Mojo belum menunjukkan kegiatan serupa. Wulandari et al., (2021) memperkuat temuan ini dengan menegaskan bahwa kesenjangan digital peserta didik sekolah dasar tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan perangkat, tetapi juga oleh rendahnya literasi digital dan kurangnya pendampingan guru.

Dari perspektif perkembangan kognitif Piaget, peserta didik kelas tinggi sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret sehingga pemahaman paling efektif dibangun melalui pengalaman langsung (Ma'rifatun Nisaa et al., 2025). Penayangan dua sumber berbeda secara langsung di layar kelas merupakan strategi yang tepat secara perkembangan karena memberikan stimulus konkret untuk membentuk skema berpikir kritis. Perbedaan strategi guru ini berpengaruh langsung pada seberapa jauh skema berpikir kritis peserta didik terstimulasi, di mana strategi pemberian kata kunci spesifik membantu peserta didik membangun skema sederhana tentang cara mencari informasi, sementara pemodelan perbandingan dua sumber mendorong peserta didik ke tahap mengevaluasi konten secara kritis sesuai tahap perkembangan kognitif Piaget. Dalam kerangka kompetensi kewarganegaraan (Branson, 1999), akses informasi digital yang kritis merupakan bagian dari *civic skill* intelektual, yaitu kemampuan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis informasi sebagai prasyarat partisipasi kewarganegaraan yang efektif, sejalan dengan pergeseran pendidikan kewarganegaraan modern dari pendekatan berbasis hafalan menuju pengembangan keterampilan berpikir kritis yang dalam konteks digital berarti kemampuan mengevaluasi kredibilitas sumber informasi. Dengan demikian, akses informasi digital dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila di ketiga sekolah berlangsung melalui pola *teacher-mediated access* yang konsisten, dengan kualitas literasi kritis yang berbeda sesuai intensitas bimbingan guru dan kelengkapan infrastruktur, sehingga berkontribusi pada penguatan elemen *digital access* dan *digital literacy* dalam kerangka *digital citizenship.*

Komunikasi Digital sebagai Ekosistem Pedagogis Lintas Konteks

Temuan penelitian mengungkapkan dua pola utama pada dimensi komunikasi digital. Pertama, terbentuknya ekosistem komunikasi segitiga antara sekolah, orang tua, dan peserta didik melalui grup percakapan sebagai kanal dua arah yang berfungsi memperpanjang jangkauan pedagogis melampaui batas ruang kelas. Kedua, internalisasi norma sopan santun dan keamanan digital yang konsisten pada seluruh delapan belas peserta didik dari tiga sekolah berbeda yang tidak

Attribution-NonCommercial-ShareAlike. Beberapa hak dilindungi

berkoordinasi formal. Ribble & Bailey (2011) mendefinisikan *digital communication* sebagai proses pertukaran informasi secara elektronik yang menekankan kemampuan berkomunikasi secara efektif, tepat, dan bertanggung jawab, sementara Ribble (2015) mempertegas bahwa *digital communication* mencakup pemahaman terhadap etika, norma, dan dampak komunikasi digital terhadap diri sendiri dan orang lain.

Analogi konkret tentang permanensi pesan digital yang disampaikan salah satu guru di SD Negeri Mojo, bahwa kata-kata tertulis di ruang digital dapat dibaca berulang dan menyakiti terus-menerus berbeda dengan kata lisan yang hilang setelah diucapkan, merupakan pendekatan pedagogis yang secara konkret membangun kesadaran akan dimensi *digital permanence*. Dewi et al., (2021) menegaskan bahwa rendahnya pemahaman etika komunikasi digital berpotensi menimbulkan perilaku komunikasi yang kurang santun, sehingga penguatan melalui analogi konkret menjadi penting secara pedagogis. Pendekatan guru di SD Kristen Manahan yang mengintegrasikan etika komunikasi digital secara langsung dengan sila kedua Pancasila mengubah etika komunikasi digital dari sekadar kewajiban teknis eksternal menjadi ekspresi nilai internal yang berakar pada identitas kebangsaan, sejalan dengan konsep *civic disposition* (Branson, 1999), yaitu watak kewarganegaraan yang dalam era digital mencakup watak komunikasi digital yang beradab.

Temuan tentang grup percakapan orang tua sebagai kanal dua arah sejalan dengan prinsip *digital communication* dan *digital rights and responsibilities* (Ribble & Bailey, 2011) yang menegaskan bahwa komunikasi digital yang efektif tidak berhenti di ruang kelas, melainkan meluas ke seluruh konteks kehidupan peserta didik. Orang tua yang melaporkan perilaku digital anak dari rumah dan guru yang merespons dengan menyesuaikan strategi kelas merupakan wujud nyata ekosistem *digital citizenship* yang holistik. Ekosistem komunikasi digital semacam ini hanya dapat berjalan efektif apabila guru memiliki kompetensi teknologi yang memadai, sebagaimana ditegaskan oleh penelitian yang menunjukkan bahwa penguatan kompetensi guru sekolah dasar dalam memanfaatkan teknologi turut menentukan keberhasilan proses pembelajaran dan evaluasi berbasis digital (Mahfud et al., 2019). Kusdiani & Tirtoni (2025) juga menegaskan pentingnya pelibatan ekosistem yang lebih luas dalam pendidikan karakter berbasis nilai Pancasila. Konsistensi seluruh delapan belas peserta didik dalam menyebutkan larangan membagikan data pribadi dan prosedur menghadapi tautan mencurigakan merupakan temuan yang signifikan secara fenomenologis, sebab hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran digital security di ketiga sekolah telah melampaui tahap hafalan dan memasuki tahap internalisasi nilai. Dalam perspektif perkembangan moral Kohlberg, pernyataan peserta didik yang menghindari huruf kapital secara penuh bukan karena aturan guru melainkan karena memahami maknanya menunjukkan perkembangan menuju tahap yang lebih berbasis prinsip etika yang diyakini sendiri, bukan sekadar kepatuhan pada aturan. Dengan demikian, komunikasi digital dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila di ketiga sekolah berlangsung melalui ekosistem komunikasi segitiga yang memperluas jangkauan pedagogis ke ranah keluarga,

sehingga berkontribusi signifikan pada penguatan elemen *digital communication* dan *digital security* dalam kerangka *digital citizenship*.

Etika Digital sebagai Perwujudan Nilai Pancasila

Temuan penelitian pada dimensi etika digital merupakan yang paling kaya dan beragam, mengungkap dua pola utama. Pertama, integrasi organik nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi etika digital yang muncul secara independen di ketiga sekolah berbeda jenis kelembagaan tanpa koordinasi formal. Kedua, variasi strategi kesehatan digital dan literasi hak cipta yang mencerminkan perbedaan kontekstual antar sekolah, namun dengan substansi yang konvergen pada pembentukan karakter digital yang berakar pada identitas nilai kebangsaan. Ribble & Bailey (2011) mendefinisikan *digital etiquette* sebagai standar perilaku dan tata krama dalam penggunaan teknologi digital yang menekankan sikap sopan, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Temuan penelitian ini melampaui konseptualisasi tersebut dengan menemukan bahwa etika digital di ketiga sekolah tidak diajarkan sebagai norma teknis yang terpisah, melainkan diintegrasikan secara langsung dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam perspektif perkembangan moral Kohlberg, pendekatan pengaitan etika digital dengan sila-sila Pancasila secara tidak langsung mendorong peserta didik bergerak dari tahap konvensional yang berbasis kepatuhan aturan menuju tahap yang berbasis prinsip nilai. Strategi *pause before you post* yang diajarkan salah satu guru di SD Kristen Manahan menarik dari perspektif kognitif Piaget, karena kemampuan menunda respons impulsif merupakan fungsi eksekutif yang pada anak sekolah dasar masih dalam tahap perkembangan, berkaitan dengan transisi dari operasional konkret menuju operasional formal. Dengan mengajarkan prinsip ini secara eksplisit, guru tersebut sedang memfasilitasi transisi kognitif yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik menurut Piaget, yaitu membantu mereka bergerak dari pola respons impulsif khas operasional konkret menuju kemampuan refleksi terencana yang menjadi ciri tahap operasional formal. Penggunaan media pembelajaran interaktif turut berperan penting dalam memfasilitasi transisi kognitif tersebut, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian bahwa media semacam ini mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik pada pembelajaran Pendidikan Pancasila (Ahsania & Chumdari, 2025).

Pada aspek kesehatan digital, variasi antar sekolah paling mencolok, di mana SD Aisyiyah Unggulan Gemolong dengan aturan dua puluh menit-dua puluh kaki-dua puluh detik yang dikomunikasikan kepada orang tua dan SD Kristen Manahan dengan tantangan satu hari bebas layar yang melibatkan keluarga menunjukkan pendekatan terencana dan terstruktur, sementara SD Negeri Mojo menunjukkan pendekatan lebih reaktif. Ribble (2015) mendefinisikan *digital health and wellness* sebagai kondisi kesehatan fisik dan psikologis dalam menggunakan teknologi digital, dan temuan ini mengonfirmasi bahwa kesehatan digital bukan semata soal pengetahuan melainkan juga soal kondisi fisik lingkungan belajar. Pada aspek hak cipta digital, respons peserta didik yang secara spontan mengaitkan kewajiban mencantumkan sumber dengan nilai menghargai jerih payah pembuat karya merupakan bukti bahwa literasi hak cipta digital tertanam paling dalam ketika

dikaitkan dengan nilai etis Pancasila. Dalam kerangka *digital law* Ribble (2015), pemahaman ini melampaui level kepatuhan hukum dan memasuki level kesadaran etis. Temuan tentang *peer monitoring* di SD Aisyiyah Unggulan Gemolong, di mana peserta didik saling mengingatkan etika bahasa digital, relevan dengan konsep *digital rights and responsibilities* Ribble (2015) dan nilai gotong royong Pancasila, serta merupakan bukti *civic disposition* digital yang matang karena peserta didik tidak hanya mematuhi aturan tetapi aktif menjaga ekosistem digital kelas secara bersama-sama (Branson, 1999). Dengan demikian, etika digital dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila di ketiga sekolah berlangsung melalui integrasi organik nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi motivasi *intrinsik*, yang terbukti menghasilkan *internalisasi* lebih dalam dibandingkan pendekatan aturan teknis eksternal, sehingga berkontribusi signifikan pada penguatan elemen *digital etiquette, digital law, digital health and wellness, dan digital rights and responsibilities* dalam kerangka *digital citizenship*.

Sintesis

Tiga pola struktural muncul secara konsisten dari keseluruhan temuan. Pertama, integrasi nilai Pancasila sebagai motivasi *intrinsik* etika digital terbukti menghasilkan *internalisasi* lebih dalam dibandingkan pendekatan aturan teknis eksternal. Kedua, ekosistem komunikasi segitiga sekolah-orang tua-peserta didik merupakan mekanisme pembinaan digital yang efektif melampaui batas ruang kelas (Abiyuna et al., 2024). Ketiga, variasi kualitas implementasi berkorelasi dengan ekosistem kelembagaan, di mana sekolah dengan infrastruktur lebih memadai menunjukkan implementasi lebih terstruktur, meskipun guru di sekolah dengan keterbatasan infrastruktur tetap menunjukkan kreativitas pedagogis yang tinggi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan *digital citizenship* berbasis literasi digital dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah dasar berlangsung secara kontekstual pada tiga dimensi. Akses informasi digital terjadi melalui pola *teacher-mediated access* yang konsisten dengan kualitas literasi kritis berbeda sesuai intensitas bimbingan guru dan kelengkapan infrastruktur. Komunikasi digital terbentuk melalui ekosistem segitiga sekolah-orang tua-peserta didik yang berhasil menumbuhkan *internalisasi* norma sopan santun dan keamanan digital secara merata. Etika digital terintegrasi secara organik dengan nilai Pancasila tanpa instruksi eksplisit antar guru. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi *digital citizenship* tidak memerlukan mata pelajaran baru, melainkan dapat dilakukan secara organik dengan mengaitkan etika digital pada nilai-nilai Pancasila yang sudah ada, disertai pemodelan *eksplisit* praktik verifikasi sumber. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan desain *longitudinal* untuk menelusuri perkembangan *digital citizenship* dari waktu ke waktu, serta memperluas cakupan ke jenjang sekolah menengah pertama atau membandingkan implementasi di daerah perkotaan dan perdesaan.

DAFTAR PUSTAKA

Abiyuna, T., Yuliyani, L., & Apriyani, D. (2024). Menyusun model pembelajaran

berbasis etika digital dalam mewujudkan good and smart digital citizenship. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, *23*(2), 316–324. https://doi.org/10.21009/jimd.v23i2.40379

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, *6*(1), 974–980. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394

Ahsania, M. M., & Chumdari, C. (2025). Penerapan media educaplay untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik pada mata pelajaran pendidikan Pancasila di kelas V sekolah dasar. *Didaktika Dwija Indria*, *13*(6). https://doi.org/10.20961/ddi.v13i6.106178

APJII. (2025). *Profil Pengguna Internet Indonesia 2025*. APJII.

Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, *1*(2), 1–9. https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57

Azis, A., Maftuhin, M., & Nugraha, D. M. (2021). Citizenship education in the Covid-19 era: How to become a digital citizen? *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, *18*(2), 207–216. https://doi.org/10.21831/jc.v18i2.40833

Branson, M. S. (1999). *The Role of Civic Education*. Center for Civic Education.

Colaizzi, P. F. (1978). Psychological Research as the Phenomenologist Views It. In R. S. Valle & M. King (Eds.), *Existential-Phenomenological Alternatives for Psychology* (pp. 48–71). Oxford University Press.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Dewi, D. A., Hamid, S. I., Annisa, F., Oktafianti, M., & ... (2021). Menumbuhkan karakter siswa melalui pemanfaatan literasi digital. In *Jurnal ….* academia.edu. https://www.academia.edu/download/103195257/pdf.pdf

Fatmasari, E. D., Banowati, C. P., Arini, A., & Tarsidi, D. Z. (2025). Transformasi pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran pendidikan Pancasila: Memaknai aturan di sekolah. *Didaktika Dwija Indria*, *13*(1), 29–34. https://doi.org/10.20961/ddi.v13i1.95925

Isabella, I., Iriyani, A., & Lestari, D. P. (2023). Literasi Digital sebagai Upaya Membangun Karakter Masyarakat Digital. *Jurnal Pemerintahan Dan ….* https://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/3236

Izzah, A. N., Santoso, A., Kusumaningrum, S. R., Dewi, R. S. I., & Arifin, S. (2025). The Digital World in the Grasp of Elementary School Children: A Systematic Literature Review of Digital Literacy. *EduHumaniora: Jurnal Pendidikan Dasar*, *17*(2), 149–162. https://doi.org/10.17509/eh.v17i2.82543

Kusdiani, R., & Tirtoni, F. (2025). Implementasi Pendidikan Pancasila berkebhinekaan global dalam menumbuhkan karakter siswa sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, *9*(2). https://doi.org/10.31004/basicedu.v9i2.9867

Ma'rifatun Nisaa, F., Mulia, S., Amalia, A., Ardiansyah, F., & Azzahra, S. (2025). Tahap perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar menurut teori Piaget dan implikasinya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *9*(1). https://doi.org/10.31004/jptam.v9i1.25011

Magfira, A., Hasanah, U., & Rahmawati, D. (2024). Penyebaran disinformasi dan dampaknya terhadap dinamika sosial masyarakat Indonesia. *Jurnal Komunikasi*, *18*(2), 210–228. https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol18.iss2.art4

Mahfud, H., Purnama Adi, F., Widianto Atmojo, I. R., & Ardiansyah, R. (2019). Peningkatan kompetensi evaluasi pembelajaran berbasis teknologi pada guru SD di Kota Surakarta. *Jurnal Pendidikan Dasar*, *7*(2). https://doi.org/10.20961/jpd.v7i2.35104

Megasari, N. (2023). Peran Pendidikan Pancasila dalam membentuk etika digital

siswa sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *11*(3), 601–612. https://doi.org/10.23887/jpku.v11i3.66437

Meilida, R., Iskandar, & Sari, P. A. (2025). Kontribusi literasi digital terhadap perundungan siber pada siswa sekolah dasar. *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Konseling*, *11*(1), 45–56. https://doi.org/10.26858/jppk.v11i1.60452

Pratiwi, F. Y., Hapsari, A. I., Sholeha, V., Muliyani, T., & Afriyanto, M. (2024). Konsep dan dimensi literasi digital sebagai kompetensi abad ke-21. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia*, *4*(3), 101–112. https://doi.org/10.52436/1.jpti.298

Ribble, M. (2015). *Digital Citizenship in Schools: Nine Elements All Students Should Know* (3rd ed.). International Society for Technology in Education.

Ribble, M., & Bailey, G. (2011). *Digital Citizenship in Schools* (2nd ed.). International Society for Technology in Education.

Rosyidah, A. Z., Septiani, N. E. P., & Wibowo, S. (2025). Mewujudkan Generasi CERDIG (Cerdas Digital): Literatur Review Integrasi Literasi Digital dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar. *Journal of Education Research*, *6*(4). https://doi.org/10.37985/jer.v6i4.2285

Social, W. A., & Meltwater. (2025). *Digital 2025: Global Overview Report*. We Are Social.

Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Surya, A., Riyadi, R., Kurniawan, S. B., & Rintayati, P. (2025). Urgensi literasi digital terhadap keterampilan numerasi dan literasi sains. *Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, *13*(1). https://doi.org/10.20961/jkc.v13i1.94884

Tarsidi, D. Z., Suryadi, K., Budimansyah, D., & Rahmat, R. (2023). *Unlocking Civic Participation : The Power of Digital Literacy for Indonesian Digital Natives*. *12*(3), 292–307.

Ulum, B., & Asrori, M. A. R. (2025). Peningkatan literasi digital pada siswa sekolah dasar untuk mencegah cyberbullying. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, *3*(8). https://doi.org/10.59837/jpmb.v3i8.2001

Widyawati, A. D., & Karina, C. (2025). Pentingnya literasi digital di sekolah dasar: Membekali siswa untuk masa depan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar (JIPDAS)*, *5*(2). https://doi.org/10.37081/jipdas.v5i2.2663

Wijaya, S. A. R., Mahfud, H., & Surya, A. (2024). Tingkat kompetensi literasi digital ditinjau dari gaya belajar peserta didik sekolah dasar muatan globalisasi. *Didaktika Dwija Indria*, *12*(6), 468–472. https://doi.org/10.20961/ddi.v12i6.91094

Wulandari, T., Yusrizal, Y., & Razali, R. (2021). Kesenjangan digital pada peserta didik sekolah dasar di Indonesia: Faktor penyebab dan strategi intervensi. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, *7*(1), 59–75. https://doi.org/10.29407/jpdn.v7i1.15953

Pernyataan Konflik Kepentingan: Penulis menyatakan bahwa penelitian dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau finansial yang dapat ditafsirkan sebagai potensi konflik kepentingan.